

# Siaga Karhutla Riau Hingga Oktober

● RR LAENY SULITYAWATI  
RIZKY SURYARANDIKA

Siaga karhutla berdasarkan prediksi kemarau Riau selama lima sampai enam bulan.

PEKANBARU—Gubernur Riau Wan Thamrin Hasyim menetapkan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) berlaku di Provinsi Riau. Gubernur memutuskan status siaga karhutla selama delapan bulan, mulai 19 Februari hingga 31 Oktober 2019.

Keputusan itu didasari sejumlah pertimbangan, salah satunya untuk menjaga agar pelaksanaan pemilu serentak 2019 tidak terganggu asap karhutla. "Ini memang perlu kita perbuat agar lebih optimal, cepat mencegah daripada kesulitan memadamkan kebakaran," kata Wan Thamrin di Pekanbaru, Selasa (19/2).

Keputusan itu disampaikan Wan Thamrin Hasyim pada rapat di kantor Gubernur Riau yang turut dihadiri instansi terkait, seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Badan Restorasi Gambut, Manggala Agni, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), TNI, Polri, dan Kejaksaan Tinggi Riau. Penetapan status siaga darurat mempertimbangkan masukan dari

BMKG bahwa Riau akan mengalami kemarau sekitar 5-6 bulan. Saat ini karhutla sudah terjadi di daerah pesisir dengan luas kebakaran lebih dari 841 hektare (ha).

Penetapan status tersebut dinilai akan meringankan upaya pencegahan dari pemerintah daerah karena akan mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). "Secara simultan kita bersatu, (pemerintah pusat juga) campur tangan. Kalau sendiri kita kewalahan," katanya.

Kepala BPBD Riau Edwar Sanger mengatakan, penetapan status siaga darurat karhutla selama delapan bulan juga mempertimbangkan kondisi tahun politik pada tahun ini. Karena biasanya status siaga darurat diberlakukan selama tiga bulan dan diperpanjang apabila dibutuhkan. "Memang harus penetapan sampai Oktober karena nanti ada pilpres, ada pileg (pemilu legislatif), tahun politik ini," ujar dia.

Dengan begitu, ia mengatakan, Satuan Tugas Karhutla Riau akan lebih fokus bekerja selama delapan bulan. Sementara, Kepala Seksi Data dan Informasi BMKG Stasiun Pekanbaru Marzuki menjelaskan, pemerintah daerah memang harus mewaspadai potensi karhutla di Riau. Kondisi cuaca pada kemarau memang relatif normal karena pengaruh El Nino tahun ini lemah.

Namun, di daerah pesisir Riau relatif lebih kering dan curah hujan sedikit. Pada Februari hingga Juli, lanjutnya, curah hujan diperkirakan akan makin berkurang, hanya bersifat

lokal dengan intensitas hujan ringan ke sedang. "Berdasarkan prakiraan kita, pada Juni kita masuk musim kemarau dan berlangsung sampai Oktober," kata Marzuki.

Berdasarkan data BPBD Riau, sejak awal Januari hingga pertengahan Februari ini luas kebakaran hutan dan lahan di Riau mencapai 841,71 ha. Lahan yang terbakar paling luas terjadi di Kabupaten Bengkalis, yaitu 625 hektare ha. Kemudian di Kabupaten Rokan Hilir seluas 117 ha, Dumai 43,5 ha, Meranti 20,2 ha, Pekanbaru 16 ha, serta Kampar 14 ha. Citra Satelit Terra-Aqua juga menunjukkan jumlah titik panas di kawasan gambut Provinsi Riau pada periode 11-17 Februari meningkat menjadi 231 titik, yang dari 48 titik pada periode 4-10 Februari. Titik panas terkonsentrasi di daerah pesisir Riau seperti di Kabupaten Bengkalis, Dumai, Kepulauan Meranti, dan Pelalawan.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) juga mengonfirmasi sedikitnya 843 hektare area (ha) lahan di Riau telah terbakar. Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho mengatakan, sebagian besar kebakaran terjadi di lahan gambut milik masyarakat dengan jenis tanaman semak belukar. Ia menambahkan, penyebab kebakaran lahan karena disengaja untuk pembukaan lahan perkebunan dan pertanian. Kebakaran ini telah menyebabkan beberapa daerah terkepung asap, meskipun intensitas, sebaran, dan durasi tidak lama. Indeks standar pencemaran udara

(ISPU) tercatat sedang hingga baik hingga Senin (18/2) kemarin.

Ia mengakui, wilayah Riau memiliki dua musim kemarau. Saat ini Riau memasuki musim kemarau tahap pertama hingga pertengahan Maret. Selanjutnya musim kemarau tahap kedua selama Juni hingga Oktober. "Setiap musim kemarau ini, ancaman kebakaran hutan dan lahan meningkat," ujarnya.

Sementara, Kepala BRG Nazir Foead menyebut mayoritas penyebab kebakaran lahan karena ulah manusia sendiri. BRG mengaku tidak kaget kasus kebakaran terjadi terus-menerus. Khususnya di wilayah Sumatra yang kaya gambut. "Tentu ini saya curiga dibakar pihak tertentu. Kalau kebakaran gambut 99 persen dibakar orang," katanya.

BRG menduga ada praktik melawan hukum di daerah yang terbakar. Nazir meminta aparat kepolisian menyelidiki dugaan pembakaran tersebut. Sehingga akan muncul efek jera bagi oknum pembakar lahan. Sebab selama ini penegakan hukum dirasa kurang menyentuh pelaku utama pembakaran lahan. Namun, sayangnya, BRG terbatas kewenangannya dalam hal penegakan hukum. BRG mesti berkoordinasi dengan lembaga penegak hukum guna menciptakan keadilan. "Kebakaran di sana kita yakin dibakar, mungkin ada hubungan dengan kegiatan melawan hukum. Perlu penegakan hukum Polri, KLHK selidiki lebih jauh, ini bukan kewenangan kami," ujarnya.